



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT
MADRASAH TSANAWIYAH

PENILAIAN AKHIR SEMESTER

Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : VIII (Delapan)
Semester/Tahun Pelajaran : Ganjil/2022-2023
Waktu : 90 menit

Petunjuk :

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian Lembar Jawaban yang disediakan;
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab;
 3. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang;
 4. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah;
 5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban;
 6. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan penghapus sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar;
 7. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kalian anggap paling benar!

Dari pernyataan di atas manakah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia:

- A. no 1, 3 dan 4 C. no 2, 3 dan 4
B. no 1, 2 dan 4 D. no 1, 2 dan 3

5. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan di lingkungan sekolah
- menjadikan sekolah sebagai tujuan pembangunan di Indonesia
 - produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat digunakan oleh masyarakat
 - mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sekolah
 - kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia
6. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini!
- Sebagai alat pemersatu bangsa*
 - Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan*
 - Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan*
 - Sebagai dasar dan sumber hukum nasional*
- Dari pernyataan di atas fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor
- 1 dan 2
 - 3 dan 4
 - 1 dan 3
 - 2 dan 4
7. Akibat bagi suatu negara yang tidak memiliki Dasar Negara
- menjadi negara yang selalu ditakuti oleh negara lain
 - menjadi negara yang rakyatnya selalu menderita
 - menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas
 - menjadi negara yang mudah dipecah belah
8. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai
- dasar berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - dasar dalam kegiatan penyelenggaraan kenegaraan
 - sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan
9. Suatu negara akan terombang-ambing karena tidak mempunyai pedoman, arah dan tujuan yang jelas, hal tersebut merupakan akibat apabila suatu negara tidak mempunyai
- jiwa dan kepribadian bangsa
 - dasar negara
 - pandangan hidup bangsa
 - perjanjian luhur bangsa
10. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
- Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah*
 - Sila pertama Pancasila di landasi sila-sila lainnya*
 - Sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima dan dijawi oleh sila yang pertama*
 - Sila kelima melandasi dan dijawi oleh sila-sila lainnya*
- Pernyataan yang tepat yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, ditunjukkan oleh nomor
- 1 dan 3
 - 1 dan 4
 - 2 dan 3
 - 3 dan 4
11. Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya
- norma-norma lainnya dalam kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
 - siapa yang melakukan pelanggaran harus ditindak kecuali pejabat dan penegak hukum
 - mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan taatpada Pancasila
 - mengikat dan memaksa negara lain untuk tunduk dan patuh pada Pancasila
12. “Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan”, hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila
- kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - kemanusiaan yang adil dan beradab
 - persatuan Indonesia
13. Apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia
 - Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama
 - Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong
 - Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
14. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
- Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan*
 - Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan*
 - Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan*

4. *Proklamasi lahir karena adanya pembukaan*
Dari pernyataan di atas yang menunjukkan adanya hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Tahun 1945 yang tepat ditunjukkan pada nomor
A. 1 dan 2 C. 1 dan 3
B. 2 dan 3 D. 3 dan 4

15. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memenuhi persyaratan, di bawah ini adalah persyaratan yang kurang tepat
A. pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara (PPKI) yang telah mewakili bangsa Indonesia
B. pembukaan memuat falsafah negara, asas politik dan tujuan negara
C. pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia
D. pembukaan dirumuskan oleh panitia sembilan yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia

16. Pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan
A. tetap, kuat dan dinamis C. tetap, kuat dan dapat diubah
B. tetap, kuat dan tidak berubah D. tetap, kuat dan fleksibel

17. Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945!
1. *Tujuan negara* 3. *Kedaulatan rakyat*
2. *Cita-cita nasional* 4. *Dasar Negara*

Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor
A. 1, 2 dan 3 C. 1, 3 dan 4
B. 1, 2 dan 4 D. 2, 3 dan 4

18. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai nilai-nilai universal dan lestari yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai luhur yang tidak memiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia
B. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah
C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai lestari, tetapi tidak dapat diterima oleh negara lain di dunia
D. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia yang mampu menampung dinamika masyarakat

19. "Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut
A. Keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan
B. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia
C. Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual
D. Negara Indonesia memiliki arah dan tujuan yang hendak diwujudkan

20. Perhatikan pernyataan berikut!
1. *Adanya kehendak warga negara agar terjamin hak-haknya*
2. *Adanya kehendak penguasa negara untuk menjamin adanya sistem pemerintahan negara*
3. *Adanya kehendak penguasa untuk mengesahkan tindakan-tindakan penguasa yang seusia dengan kehendaknya*
4. *Adanya kehendak dari beberapa negara untuk menjalin kerja sama*

Dari pernyataan di atas yang menjadi alasan suatu negara memiliki UUD, ditunjukkan pada nomor
A. 1, 2 dan 4 C. 1, 3 dan 4
B. 1, 2 dan 3 D. 2, 3 dan 4

21. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai
A. Hukum Dasar C. Hukum formal
B. Hukum tertinggi D. Hukum Dasar Tertinggi

22. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen terdiri atas
A. pembukaan dan batang tubuh C. pembukaan dan pasal-pasal
B. pembukaan dan penjelasan D. pembukaan, batang tubuh dan penjelasan

23. Di bawah ini adalah pernyataan yang tepat mengenai sifat sebuah konstitusi!
A. Suatu konstitusi dikatakan **rigid** (kaku) jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang tidak mudah
B. Suatu konstitusi dikatakan **fleksibel** (luwes) jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang istimewa
C. Suatu konstitusi dikatakan **fleksibel** (luwes) apabila tidak mampu mengikuti perkembangan iaman

- D. Suatu konstitusi dikatakan **rigid** (kaku) apabila mampu mengikuti perkembangan jaman
24. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. *Peraturan tertulis dan rumusan yang jelas*
 2. *Memuat norma-norma, aturan-aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional*
 3. *Merupakan peraturan hukum positif*
 4. *Memuat aturan-aturan yang sangat terperinci dan supel*
- UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat yang ditunjukkan pada nomor
- | | |
|---------------|---------------|
| A. 1, 2 dan 4 | C. 1, 3 dan 4 |
| B. 1, 2 dan 3 | D. 2, 3 dan 4 |
25. UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.
- Pernyataan diatas merupakan fungsi dari UUU yaitu sebagai
- | | |
|-----------------|----------------------|
| A. alat kontrol | C. penentu |
| B. pengatur | D. pemberi kebijakan |
26. Di bawah ini yang tidak termasuk kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
- A. tidak mengubah Pembukaan UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. tidak melakukan perubahan secara adendum
 - C. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - D. mempertegas sistem pemerintahan presidential
27. Akibat jika UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi maka yang akan terjadi adalah....
- A. negara Indonesia semakin berwibawa di mata negara lain
 - B. negara Indonesia semakin dikucilkan oleh negara lain
 - C. kehidupan kenegaraan lambat laun akan terpuruk
 - D. kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan
28. "Indonesia adalah negara hukum", hal ini diatur pada pasal ... UUU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- | | |
|---------------|---------------|
| A. 1 ayat (1) | C. 1 ayat (3) |
| B. 1 ayat (2) | D. 2 ayat (1) |
29. "Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang", merupakan pengertian
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| A. Peraturan Perundang-undangan | C. Undang-Undang Dasar |
| B. Peraturan Pemerintah | D. Konstitusi Negara |
30. Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. UU No.10 Tahun 2004 | C. UU No.10 Tahun 2011 |
| B. UU No.11 Tahun 2004 | D. UU No.12 Tahun 2011 |
31. Perhatikan Perundang-undangan di bawah ini!
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>UUD 1945</i> | 5. <i>Perda Provinsi</i> |
| 2. <i>Ketetapan MPR</i> | 6. <i>Perda Kabupaten</i> |
| 3. <i>Peraturan Presiden</i> | 7. <i>Peraturan Pemerintah</i> |
| 4. <i>UU/PERPPU</i> | |
- Tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang benar adalah
- | | |
|------------------|------------------|
| A. 1-2-3-4-5-6-7 | C. 2-1-4-7-3-5-6 |
| B. 1-2-4-7-3-5-6 | D. 2-1-7-3-4-5-6 |
32. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan mengandung prinsip
- A. dasar penentuan Peraturan Perundang-undangan tidak selalu Peraturan Perundang-undangan
 - B. semua Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum/yuridis
 - C. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan, dan kedudukan
 - D. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi
33. "Setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional"
- Pernyataan tersebut diatas merupakan asas ... yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan.
- | | |
|--------------------|----------------|
| A. pengayoman | C. keadilan |
| B. kepastian hukum | D. kemanusiaan |

34. Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah
- unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis
 - sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR
 - putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR
 - mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan
35. Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun Undang-Undang adalah
- Presiden bersama-sama dengan menteri
 - DPR bersama-sama dengan DPRD
 - DPR bersama-sama dengan Presiden
 - Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
36. Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
- Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dalam hal kegantungan yang tidak memaksa
 - PERPPU harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya
 - PERPPU yang tidak dapat persetujuan dari DPR, PERPPU tetap menjadi Undang-undang
 - Apabila PERPPU mendapat persetujuan dari DPR maka ditetapkan menjadi Undang-Undang
37. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) diatur dalam UUD 1945 pasal
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| A. 19 ayat (1, 2 dan 3) | C. 21 ayat (1 dan 2) |
| B. 20 ayat (1, 2, 3 dan 4) | D. 22 ayat (1, 2 dan 3) |
38. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ... sebagai mana mestinya.
- | | |
|------------------------|---------------------|
| A. Undang-Undang Dasar | C. Undang-Undang |
| B. Ketetapan MPR | D. Peraturan Daerah |
39. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Adanya perbuatan/perilaku warga negara yang mau menaati aturan-aturan hukum yang berlaku menunjukkan adanya indikator
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| A. pengetahuan hukum | C. pemahaman hukum |
| B. perilaku hukum | D. sikap terhadap norma hukum |
40. Perhatikan contoh perilaku di bawah ini!
1. *Memiliki akta kelahiran*
 2. *Mematuhi aturan berlalu lintas*
 3. *Melakukan perbuatan melawan hukum*
 4. *Tidak main hakim sendiri*
- Contoh perilaku warga negara dalam menaati perundang-undangan yang berlaku ditunjukan pada nomor
- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. 1, 2 dan 4 | B. 1, 3 dan 4 | C. 2,3, dan 4 | D. 1,2, dan 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|